

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Metode Penelitian	11
1.5.1 Tipe Penelitian.....	11
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	11
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	12
1.5.4 Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.....	13

1.6 Sistematika Penulisan	14
BAB II PERDAGANGAN BARANG HASILPENYELUNDUPAN SEBAGAI TINDAK PIDANA	15
2.1 Konsep Tindak Pidana.....	15
2.2 Perdagangan Barang Hasil Penyelundupan	20
2.3 Pengaturan Mengenai Perdagangan Barang Hasil Penyelundupan	30
2.3.1 Pengaturan Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana	30
2.3.2 Pengaturan Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.....	34
2.3.3 Pengaturan Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan	38
2.3.4 Pengaturan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Terkait	41
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERDAGANGAN BARANG HASIL PENYELUNDUPAN	44
3.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana	44
3.2 Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Barang Penyelundupan	48
3.3 Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Barang Penyelundupan	50
3.4 Analisis Beberapa Putusan	52
3.4.1 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Bls Atas Nama Terdakwa Jonny Alias Acong dan Suhendra Alias Widix	52

3.4.2 Analisis Putusan Nomor 3/Pid.B/2015/PN.Mrh Atas Nama Terdakwa Khairudin Alias Yuli	55
BAB IV PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	60
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Barang (Lembaran Negara Nomor 215 Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2210).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1995, Tambahan Lembara Negara Nomor 3612).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Nomor 93 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Nomor 45 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512).

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPM/Kep/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan.